

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N, R. 209. Konflik interpersonal dan beban kerja terhadap stress kerja PT Soka Cipta Niaga Bandung. *Skripsi*. Universitas Komputer Indonesia.
- Anisa, N, I dan Haryanto. 2022. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di masa pandemi covid-19. *Jurnal Akuntansi Aktual* 9 (1): 77-85.
- Asih, I, P, H, T. Dan Sukandani, Y. 2019. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governace. *Publikasi Ilmiah Akuntansi* 1 (1): 1506-1514.
- Bastian, I. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Erlangga. Yogyakarta.
- Darwanis. dan Chairunnisa, S. 2013. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* 6 (2) : 150-174.
- Eko. S. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Ekonomi I* (1) : 1-14.
- Fathia, N, Yusralaini, dan Angraini L. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Study Kasus Skpd Di Provinsi Riau). *Journal Online Mahasiswa* 4(1) : 670-685.
- Ghozali, I. 2016. Aplikasi Analisis Multivarite dengan SPSS. Cetakan Kedelapan. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hafzhan. M. 2021. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.
- Illayuniga, R. 2019. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.

- Jalilah, D, N, A. 2016. Tinjauan Atas Anggaran Berbasis Kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung. *Skripsi*. Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- Istiqomah, N. 2018. Analisis Implementasi Government Finance Statistics di Indonesia: Pendekatan Teori Institusional. *Indonesian Treasury Review* 3(2): 69-90.
- Kusumaningrum, I. 2010. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Tesis*. Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. BPF. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Keempat. Cetakan Keempat. Andi. Yogyakarta.
- Molan, A, C, N. 2020. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9(8):1-17
- Nadila, Z, Ahyaruddin, M, dan Agustiawan. 2021. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Perspektif Teori Institusional: Sebuah Pendekatan Penelitian Campuran. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal* 2(2): 214:223.
- Oktaviani, K, C. 2021. Hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan motivasi belajar siswa SMA X selama pembelajaran daring. *Jurnal penelitian psikologi* 8 (7): 70-80.
- Paramitha, I, A, M, D, dan Gayatri. 2016. Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16 (3): 2457-2479.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021. *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022*. 4 Agustus 2021. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019. *Sisten Informasi Pemerintah Daerah*. 25 September 2019. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114. Jakarta

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010. *Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. 31 Desember 2010. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jakarta.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. *Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. 20 November 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005. *Sistem Informasi Keuangan Daerah*. 27 Agustus 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010. *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*. 30 Agustus 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155. Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. 21 April 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80. Jakarta.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2021. *Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya*. 21 September 2021. Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 84. Surabaya.

Pitaloka, J, J. 2019. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Opd Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8 (1):1-20.

Radinda, R. Dan Saleh, S, A. 2021. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Jaringan Internet E-SAKIP Terhadap Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Survey Pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bandung). *Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar*. 4-5 Agustus 2021: 1029-1034.

Sofyani, H, dan Prayudi, M, A. 2018. Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah Dengan Akuntabilitas Kinerja "A". *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Bisnis* 13(1): 54-64

Sugiarto, I, dan Bagjana, I, F. 2017. Peran Akuntansi Pemerintahan Dalam Rangka Membangun Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Maranatha University Press* 5 (1): 1-11.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.

Susanto, A. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi : Pemahaman Konsep Secara Terpadu*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Lingga Jaya. Bandung.

Sya'roni, M. 2019. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.

Wardani, S, A. dan Dewi, S, R. 2022. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, dan Sistem Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. *Indonesian Journal of Public Policy Review* 19 : 1-9.

Yusrianti H. dan Safitri, R, H. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya* 13(4): 545-558.

